

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya perubahan di era sekarang ini cukup berpengaruh pada setiap lini keorganisasian, kelembagaan, dan managerial demi mewujudkan permintaan laporan transparan masyarakat yang semakin meningkat dan akuntabel. Dengan adanya perubahan yang berdampak pada semua lini tersebut tentunya akan melibatkan masyarakat luas dalam penilaian program-program pemerintah untuk menjadikan kinerja pemerintah semakin meningkat.

Perubahan tersebut terjadi dari sisi sistem pemerintahan sektor publik yang sebelumnya dinilai kaku lalu berubah menjadi sistem pemerintahan yang mudah dipahami, di sesuaikan dan lebih *flexibel*. Perubahan-perubahan yang terjadi juga memaksa pemerintah untuk lebih menonjolkan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi dan *akuntable*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada sektor akuntansi. Salah satunya adalah pada sektor akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu diwajibkannya menggunakan akuntansi basis akrual.

Basis akrual menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah :*“accrual basis means basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). The transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements*

recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses”

Menurut Simanjuntak (2010) akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, pencatatan dilakukan sesuai dengan saat terjadinya transaksi atau kejadian, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Akuntansi berbasis akrual juga dinilai lebih relevan menggambarkan keadaan keuangan sehingga cenderung menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah lebih mudah diaudit dan pada kenyataannya laporan keuangan pemerintah daerah yang menggunakan akuntansi berbasis akrual lebih banyak mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan harapan dapat memberikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus kas dicatat. Akuntansi berbasis akrual juga dinilai lebih ideal serta lebih akurat dalam menggambarkan keuangan dalam sebuah organisasi di bandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Sesuai pada Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 penerapan SAP berbasis akrual seharusnya paling lambat sudah di aplikasikan oleh setiap pemerintah daerah dengan optimal di awal tahun 2014. Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1). Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 juga berfungsi menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Peraturan pemerintah nomor

71 terdiri dari dua lampiran. Lampiran pertama berisi tentang SAP berbasis akrual yang akan di laksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran kedua berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual yang akan berlaku hingga 2014, dan itu berarti lampiran kedua memuat kembali semua peraturan yang ada pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanpa adanya perubahan.

Berubahnya basis yang digunakan dari basis kas menjadi akrual mempengaruhi tahapan pencatatan pada laporan keuangan yang dihasilkan. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual lebih dapat diandalkan karena menghasilkan informasi yang lebih transparan dan akuntabel bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Selain itu akuntansi berbasis akrual juga dinilai lebih mampu mendukung pemerintah dalam perhitungan berbagai jenis biaya pelayanan publik dengan wajar.

Pada akuntansi berbasis akrual dipencatatan beban, baik yang belum dibayar atau sudah dibayarkan akan memperlihatkan pengukuran yang baik, pengungkapan kewajiban masa mendatang dan pengakuan yang tepat waktu. Jika dilihat berdasarkan rangka pengukuran kinerja, akuntansi berbasis akrual akan menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan akuntabel dan tansparan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual ini merupakan sebuah poses yang berkelanjutan dan terpadu, dampaknya pun tidak bisa di rasakan dalam waktu yang singkat sejak diberlakukannya akuntansi berbasis akrual ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan sistem akuntansi akrual menurut penulis antara lain adalah kualitas komunikasi, kualitas komitmen organisasi dan kualitas teknologi informasi serta pemahaman sumber daya manusia.

Pada kenyataannya SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Sleman masih mengalami masalah pemahaman pencatatan dengan sistem akrual basis. Penulis dapat menyatakan demikian berdasarkan LAKIP Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2015. Dalam LAKIP tersebut dituliskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014, BPK Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diraih merupakan yang ke empat kalinya, sebelumnya opini WTP diperoleh untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Namun, dalam LAKIP tersebut juga diungkapkan bahwa, masih didapati hambatan/masalah yang masih terjadi, yaitu petugas pengelola keuangan belum seluruhnya memahami pencatatan dengan akrual basis. Berdasarkan tersebut itulah penulis tertarik meneliti tentang SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Sleman yang mendapatkan empat kali opini WTP dari BPK tetapi masih mengungkapkan hambatan tentang kurangnya pemahaman pegawai terhadap pencatatan berbasis akrual basis.

Menurut Akyarrudin (2013) penerapan akuntansi berbasis akrual sudah harus diaplikasikan pada tahun 2008 sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan nergara. Walaupun peraturan tentang akuntansi berbasis akrual sudah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya sistem akuntansi berbasis akrual ini belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk secepatnya menerapkan akrual basis. Pemerintah juga dituntut untuk mampu mengawal proses pemerintahan akrual secara berhati-hati dengan persiapan yang terstruktur dan matang.

Penelitian-penelitian terhadap akrual basis terdahulu menunjukkan adanya ketidak konsistenan. Hal ini dikarenakan berbedanya situasi dan kondisi objek penelitian. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Kusuma (2013) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) I Semarang, serta penelitian Pambajeng (2016) yang meneliti pemerintah Kab. Wonosobo.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin menguji pengaruh dari kualitas komunikasi dan teknologi informasi terhadap pemahaman SDM tentang penerapan SAP berbasis akrual dengan komitmen organisasi sebagai variable intervening. Penelitian terhadap pemahaman SDM dalam penerapan akuntansi akrual pada tingkat satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai tingkat adopsi dan implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Komunikasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pemahaman Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Di Skpd Kab Sleman)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi terhadap komitmen organisasi?
2. Apakah terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap komitmen organisasi?
3. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual?

4. Apakah terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual?
5. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual?
6. Apakah terdapat pengaruh Komunikasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening?
7. Apakah terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Komunikasi terhadap komitmen organisasi.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Teknologi Informasi terhadap komitmen organisasi.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Komunikasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Teknologi Informasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.
5. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

6. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Komunikasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.
7. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Teknologi Informasi terhadap pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP, dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada dalam perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah wawasan akademisi mengenai analisa pemahaman terhadap SAP untuk mengetahui kinerja manajerial dalam menyusun laporan keuangan dipemerintah Kabupaten Sleman. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan SAP 2010, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah.

3. Keunikan penelitian

Keunikan penelitian ini dibanding dengan penelitian lainnya adalah penelitian ini adalah penelitian menggunakan variabel intervening dengan komitmen organisasi sebagai variabelnya. Penulis memilih komitmen organisasi sebagai variabel intervening dengan alasan komitmen organisasi dinilai mampu member pengaruh yang signifikan kepada dua variabel independen. Komitmen organisasi juga merupakan sebuah keadaan dimana semua pegawai dituntut untuk dapat memiliki komitmen yang kuat dalam berorganisasi.